

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021



**KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengadegan, 10 Maret 2022



DANANG NUSWALITORO, S.STP, M.Si

Pembina (IV.a)

NIP. 19780703 199701 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Pengadegan tahun 2016-2021. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pengadegan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.023.830.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.791.912.307,00 atau mencapai 88,54%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah Tinggi.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pengadegan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Isu Strategis	11
D. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Evaluasi Sasaran Strategis	19
C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran	34
BAB IV PENUTUP	37
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.

B. KONDISI UMUM KECAMATAN PENGADEGAN

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Pengadegan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak \pm 12,30 Km hingga 23,40 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 157,78 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum \pm 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa, 39 Dusun, 72 RW dan 211 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Rembang
- Selatan : Kecamatan Kejobong
- Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kaligondang

Kecamatan Pengadegan memiliki luas 4.175,04 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 50 Ha (1.2%) dan tanah kering seluas 4.125,04 Ha (98.8%). Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Pengadegan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Pasunggingan	522.24	6	12	32
2	Pengadegan	668.08	6	21	46
3	Karangjoho	241.82	3	3	10
4	Larangan	468.8	5	6	30
5	Panunggalan	366.18	2	5	15
6	Bedagas	648.98	5	9	22

7	Tumanggal	413.08	5	5	17
8	Tegalpingen	845.86	4	5	26
9	Tetel	345,64	3	6	13
	Jumlah	4,175.04	39	72	211

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2021.

2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Pengadegan tercatat sebanyak 41,668 orang, terdiri dari laki-laki 20.941 jiwa (51.28%) dan perempuan 21.062 jiwa (48,71%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Pengadegan

No	Desa	Pria		Wanita		Jumlah Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Panunggalan	1,136	49.67%	1,151	50.33%	2,287	5.49%
2	Larangan	2,355	48.97%	2,454	51.03%	4,809	11.54%
3	Pasunggingan	3,087	50.49%	3,027	49.51%	6,114	14.67%
4	Pengadegan	5,151	50.62%	5,025	49.38%	10,176	24.42%
5	Karangjoho	1,118	50.18%	1,110	49.82%	2,228	5.35%
6	Bedagas	2,287	50.23%	2,266	49.77%	4,553	10.93%
7	Tumanggal	2,092	50.42%	2,057	49.58%	4,149	9.96%
8	Tegalpingen	2,414	50.44%	2,372	49.56%	4,786	11.49%
9	Tetel	1,301	50.70%	1,265	49.30%	2,566	6.16%
	Jumlah	20,941	50.26%	20,727	49.74%	41,668	100%

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2021.

Dari table diatas, Desa Pengadegan adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 10.176 jiwa (24.42%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Karangjoho yang memiliki jumlah penduduk 2.228 jiwa (5.35%).

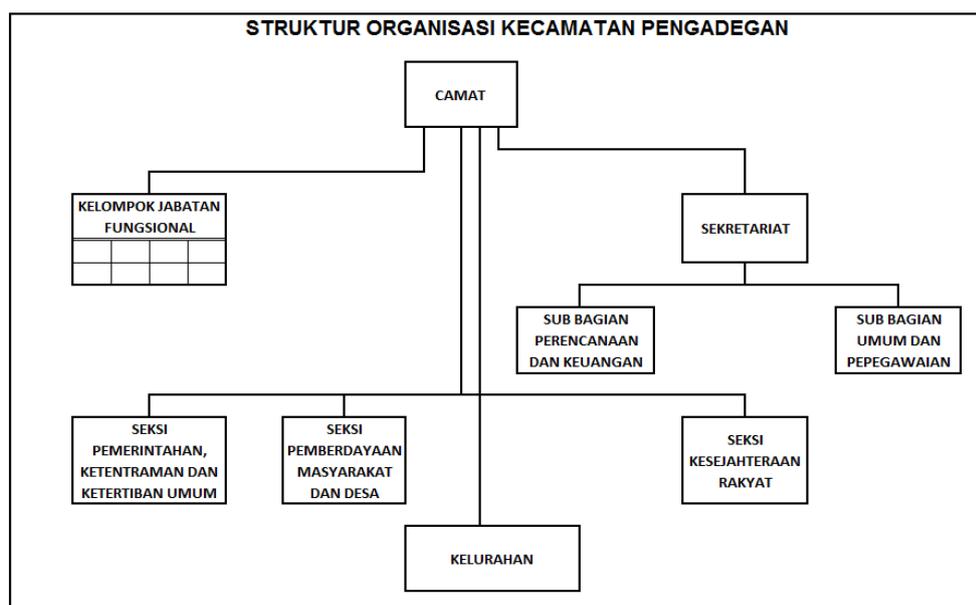
C. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Pengadegan



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
 - 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
 - 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan

masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.

8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan

kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca

Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. KEPEGAWAIAN.

Pada akhir tahun 2021 Kecamatan Pengadegan memiliki pegawai sebanyak 19 orang yang terdiri dari 13 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 19 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Kecamatan Pengadegan

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	16	84,21%
		P	3	15,79%
			19	100,00%
2	Pendidikan	SLTP	1	5,26%
		SLTA	13	68,42%
		Diploma	1	5,26%
		S-1	3	15,79%
		S-2	1	5,26%
			19	100,00%
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	6	31,58%
		II	5	26,31%
		III	7	36,84%
		IV	1	5,26%
			19	100,00%

E. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Pengadegan, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja Perangkat Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena keterbatasan kemampuan anggaran dan kompetensi serta perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan kecamatan, seperti pojok laktasi dan taman layak anak.
4. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.
5. Pemanfaatan dan tukar menukar TKD yang belum mencapai titik final, memerlukan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu juga diperlukan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengelolaannya.
6. Secara kewilayahan, Kecamatan Pengadegan memiliki potensi pertanian hortikultura yang besar, baik dari kelompok Olerikultura/sayuran, Florikultura/hias, Frutikultura/buah-buahan dan Biofarmaka/obat-obatan. Sehingga untuk menunjang kesinambungan Pengadegan sebagai kawasan pertanian unggulandiperlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
7. Pertanian masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Pengadegan, sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan.
8. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
9. Industri olahan tumbuh dengan baik sehingga perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga.
10. Kawasan situs sejarah yang berada di desa belum terekplor secara maksimal, disebabkan keterbatasan SDM yang terlibat dalam pengelolaannya. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai suatu paket kawasan wisata.
11. Pengadegan merupakan jalur strategis. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan di wilayah Kecamatan

Pengadegan. Dengan perbaikan akses jalan, diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat dan juga mendukung industri kepariwisataan di wilayah Purbalingga secara umum.

12. Kecamatan Pengadegan merupakan kawasan rawan bencana alam tanah longsor/bergerak, kekeringan/kekurangan air bersih di musim kemarau, angin ribut, dan kebakaran

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU).
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti;
2. Predikat LAKIP;
3. Jumlah desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pengadegan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,3 Angka
2	Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.	Persentase layanan Administrasi Umum yang sesuai SOP	100%
		Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	50 (CC)
3	Peningkatan Koordinasi di Bidang Pemtrantibum.	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Laporan
		Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	-
4	Peningkatan Koordinasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Cakupan Desa Yang melaksanakan tertib administrasi.	100%
5	Peningkatan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Persentase keaktifan lembaga desa	100%

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 2.023.850.500,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Pengadegan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2021. Cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil.
2. Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
3. Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
4. Capaian Kinerja < 50% = Tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	-	NA
		Predikat LAKIP	Predikat	50 (CC)	-	NA
		Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Desa	6	6	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,3	81,4	100

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja keuangan di Kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	-	NA
		Predikat LAKIP	Predikat	50 (CC)	-	NA
		Siklus tahunan Desa tepat waktu	Desa	6	6	100

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,3	81,4	100
		Persentase keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti	%	100	100	100
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	Keg	6	6	100
4.	Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan	Gangguan ketertiban Masyarakat	Kasus	-	-	100
		Konflik SARA	Kasus	-	-	100
		Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	%	100	100	100

Dari 4 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Pengadegan adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Sangat berhasil		
2.	Berhasil	4	9
3.	Cukup berhasil		
4.	Tidak berhasil		
5.	Data belum tersedia		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	<50	>50 sd80	>80 sd 95	>95 sd 100
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di Kecamatan	3	NA				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	2	100				√
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1	100				√
4	Meningkatnya kerukunan masyarakat	3	100				√

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran 1

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di Kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya yaitu persentase temuan yang ditindaklanjuti dan predikat LAKIP belum dapat dilakukan pengukuran sehingga hasilnya belum dapat ditampilkan.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	-	NA
2	Predikat LAKIP	Angka	50 (CC)	-	NA
3	Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Desa	6	6	100
	Rata – rata capaian				NA

a. Persentase Temuan yang ditindak lanjuti

Selama periode Januari-Desember 2021 belum dilaksanakan pemeriksaan yang dilakukan baik internal maupun eksternal.

b. Predikat LAKIP

Pada tahun 2021, Kecamatan Pengadegan belum mendapatkan hasil evaluasi LAKIP dari Inspektorat, karena hasil evaluasi LAKIP baru akan disampaikan pada triwulan II-III.

c. Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu

Dari 9 Desa di Wilayah Kecamatan Pengadegan, 6 Desa telah melaksanakan siklus tahunan Desa dengan tepat waktu

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 dengan target kinerja tahun 2022 (tahun terakhir Renstra 2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2021
Kecamatan Pengadegan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	-	100
2	Predikat LAKIP	Angka	50	-	50
3	Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Desa	6	6	9

Dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2020 dan 2021 dapat disampaikan bahwa pencapaian target desa yang menyelesaikan siklus tahunan desa secara tepat waktu tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk dua indikator kinerja lainnya belum dapat dibandingkan karena belum tersedianya data. Sementara dengan mencermati progres pencapaian dari tahun 2020-2021 dimungkinkan tiga komponen target kinerja Sasaran 1 pada tahun 2021 dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sedangkan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.398.909.250,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.476.660.000,00 atau 95% dari target. Dengan realisasi keuangan sebesar 95% dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ke 3 sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas SDM/personil, baik di Kecamatan maupun Desa.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan
Kecamatan Pengadegan Tahun 2021

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
A. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B. Predikat LAKIP	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
C. Siklus Tahunan Desa tepat waktu	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari 1 program dengan 6 kegiatan yang ada, realisasi keuangan dan fisiknya sebesar 89,13%. Untuk 6 kegiatan realisasi keuangan dan fisik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.428.000	2.958.000	6.470.000	31%	31%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.476.660.000	1.398.909.250	77.750.750	95%	95%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.595.500	62.650.290	8.945.210	88%	88%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.200.000	39.700.000	3.500.000	92%	92%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.620.000	34.558.000	12.062.000	74%	74%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.857.000	51.548.767	85.308.233	38%	38%

Untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Capaian Kinerja 80% s/d 95% masuk Predikat Kinerja “Berhasil”. Keberhasilan tersebut sebagian besar ditunjang dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik.

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Capaian Kinerja 50% s/d 80% masuk Predikat Kinerja “Cukup Berhasil”. Hal ini dikarenakan Anggaran yang tersedia cukup besar sedangkan kebutuhan tidak sebesar anggaran yang ada.

Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Capaian Kinerja <50% masuk Predikat Kinerja “Tidak Berhasil”. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak tersedianya pejabat/pegawai yang menangani secara langsung terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dan kurangnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga sampai dengan batas waktu kegiatan tidak bisa selesai dilaksanakan.

2. Sasaran 2

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100% dan 100% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 13
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,30	81,40	100
2.	Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
	Rata-rata capaian				100

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2021, berdasarkan hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Pengadegan atas berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seksi dan sekretariat diperoleh nilai sebesar 81,40 yang berarti melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 81,30.

b. Persentase keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti

Pada tahun 2021, di Kecamatan Pengadegan tidak terdapat keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban yang menonjol sehingga setiap keluhan/pengaduan keamanan yang ada semuanya dapat ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020 dan 2021 dengan target kinerja tahun 2022 (tahun terakhir RPJMD 2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,08	81,40	81,80
2	Persentase keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti	%	100	100	100

Dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2020 dan 2021 dapat disampaikan bahwa pencapaian target IKM mengalami progres kenaikan yang cukup baik. Dari yang sebelumnya 79,08 menjadi 81,40. Bahkan pencapaian di tahun 2021 telah melampaui target IKM di tahun 2021 (81,30). Sedangkan untuk satu indikator kinerja lainnya, dengan

mencermati progres pencapaian dari tahun 2020 - 2021 dan juga kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Pengadegan, dimungkinkan target kinerja pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 18.343.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 26.593.000,00 atau 68,98% dari target. Realisasi keuangan sebesar 68,98% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi secara umum adalah terbatasnya kapasitas SDM/personil serta kondisi prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan
Kecamatan Pengadegan Tahun 2021

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
A. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
B. Persentase keluhan/pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti	2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Dari 1 program dengan 2 kegiatan yang ada, realisasi keuangan dan fisiknya sebesar 68,98%. Untuk 2 kegiatan realisasi keuangan dan fisik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16

Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.349.000	13.220.000	8.129.000	62%	62%
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5.244.000	5.123.000	121.000	98%	98%

Untuk kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Capaian Kinerja 80% s/d 95% masuk Predikat Kinerja “Berhasil”. Keberhasilan tersebut sebagian besar ditunjang dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik.

Untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Capaian Kinerja 50% s/d 80% masuk Predikat Kinerja “Cukup Berhasil”. Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan penyelenggaraan kegiatan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi secara zoom meeting.

3. Sasaran 3

“Meningkatnya keberdayaan masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya keberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 17
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengadegan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	Kegiatan	6	6	100

Pada tahun 2021, Kecamatan Pengadegan telah memfasilitasi kegiatan masyarakat sebanyak 6 kegiatan berupa kegiatan pemberdayaan di berbagai bidang.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020, 2020 dengan target kinerja tahun 2022 (tahun terakhir RPJMD 2016-2021) adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	Kegiatan	6	6	6

Dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2020 dan 2021 dapat disampaikan bahwa pencapaian indikator kinerja Sasaran 3 tidak mengalami perubahan. Namun dengan memperhatikan klasifikasi pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini, di masa yang akan datang fasilitasi kegiatan masyarakat dimungkinkan untuk dapat menjadikan bidang-bidang tertentu menjadi sektor unggulan. Sehingga dimungkinkan terdapat kegiatan kemasyarakatan yang menjadi andalan dan mendorong sektor lainnya untuk semakin maju.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Sasaran 3 sebesar Rp. 80.888.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 89.743.000,00 atau 90% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, semangat dari warga masyarakat dan juga didukung dengan anggaran yang memadai.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya dukungan prasarana di sejumlah sektor pemberdayaan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut :

Tabel 18

Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
A. Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dari 1 program dan 1 kegiatan yang ada pada Sasaran 3, realisasi keuangan dan fisik kesemuanya mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain tidak terdapat kendala dan permasalahan signifikan yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan. Sehingga berbagai variasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

4. Sasaran 4

“Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan ”dengan 3 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 19

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Pengadegan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Gangguan ketertiban masyarakat	Kasus	-	-	100
2	Konflik SARA	Kasus	-	-	100
3	Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	%	100	100	100
	Rata – rata capaian				100

Gangguan ketertiban masyarakat

Pada tahun 2021, di Kecamatan Pengadegan tidak terdapat gangguan ketertiban masyarakat sehingga realisasinya adalah 0 kasus.

Konflik SARA

Pada tahun 2021, di Kecamatan Pengadegan tidak terdapat kasus konflik SARA sehingga realisasinya adalah 0 kasus

Persentase nilai tradisi yang difasilitasi

Dari 5 varian kegiatan pemberdayaan bidang budaya yang direncanakan dapat terealisasi sebanyak 5 kegiatan. Yaitu festival lagu dolanan anak, pelestarian seni dan budaya tradisional, gelar budaya, pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya, serta mertti dusun. Sehingga realisasi untuk indikator nilai tradisi yang difasilitasi mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020-2021 dengan target kinerja tahun 2022 (tahun terakhir RPJMD 2016-2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Gangguan ketertiban masyarakat	Kasus	-	-	-
2	Konflik SARA	Kasus	-	-	-
3	Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	%	100	100	100

Dengan memperhatikan realisasi kinerja di tahun 2020 dan 2021 dapat disampaikan bahwa pencapaian target kasus gangguan ketertiban masyarakat dan konflik SARA tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk indikator kinerja, persentase nilai tradisi yang difasilitasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2021. Sementara dengan mencermati progres pencapaian dari tahun

2020-2021 dimungkinkan tiga komponen target kinerja Sasaran 4 pada tahun 2022 dapat tercapai dengan baik.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Sasaran 4 adalah sebesar Rp. 102.357.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 123.134.000,00 atau 83,13% dari target. Realisasi keuangan sebesar 83,13% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing disertai anggaran yang memadai, serta adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas SDM/personil, kondisi prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang belum memadai, serta adanya pengaruh negatif perkembangan teknologi dan informasi yang terkait dengan ketahanan Ipoleksosbudkam.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan
A. Gangguan ketertiban masyarakat	1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
B. Konflik SARA	3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
C. Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	4. PROGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dari 2 program dengan 2 kegiatan yang ada, realisasi keuangan dan fisiknya sebesar 83,13%. Untuk 2 kegiatan realisasi keuangan dan fisik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22

Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.925.000	31.650.000	10.275.000	75%	75%
II	PROGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.209.000	70.707.000	10.502.000	87%	87%

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Capaian Kinerja 80% s/d 95% masuk Predikat Kinerja “Berhasil”. Keberhasilan tersebut sebagian besar ditunjang dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik.

Untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian Kinerja 50% s/d 80% masuk Predikat Kinerja “Cukup Berhasil”. Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan penyelenggaraan kegiatan. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi secara zoom meeting.

C. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	% Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	1.784.360.500	1.590.324.307	89,13	89,13	Efisien
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	26.593.000	18.343.000	68,98	68,98	Efisien
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	89.743.000	80.888.000	90	90	Efisien
4.	Meningkatnya kerukunan masyarakat di kecamatan	123.134.000	102.357.000	83,13	83,13	Efisien
Jumlah		2.023.830.500	1.791.912.307	88,54		

Melalui tabel tersebut, secara umum upaya pencapaian ke 4 sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan rata-rata realisasi fisik dapat mencapai 88,54% atau bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 88,54%.

Sedangkan kondisi khusus dari target dan realisasi anggaran per kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 23
Laporan Realisasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase Keuangan	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.428.000	2.958.000	6.470.000	31%	31%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.476.660.000	1.398.909.250	77.750.750	95%	95%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.595.500	62.650.290	8.945.210	88%	88%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.200.000	39.700.000	3.500.000	92%	92%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.620.000	34.558.000	12.062.000	74%	74%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.857.000	51.548.767	85.308.233	38%	38%
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.349.000	13.220.000	8.129.000	62%	62%
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5.244.000	5.123.000	121.000	98%	98%
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.743.000	80.888.000	8.855.000	90%	90%
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	41.925.000	31.650.000	10.275.000	75%	75%
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.209.000	70.707.000	10.502.000	87%	87%
Jumlah		2.023.830.500	1.791.912.307	231.918.193	88,54%	88,54%

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien. Dengan berdasar pada penghitungan pencapaian output kegiatan, dari 11 kegiatan yang ada, semua kegiatan mencapai target fisik hingga 100%.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara umum disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 dengan 4 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.